

Diterbitkan dua kali setahun, April dan Oktober, berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian-kajian ilmiah di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Hukum serta Ilmu-ilmu Sosial

**Ketua Pengarah**

Dr. M.Nur Mustafa, M.Pd (Dekan FKIP UNRI)

**Wakil Pengarah**

Zulrifan, S.Si, M.Si (PD I FKIP UNRI)

**Penanggung Jawab**

SRI ERLINDA, S.IP., M.Si. (Kajur P.IPS FKIP UNRI)

Drs. Zahirman, MH. (Ka Prodi PPKn FKIP UNRI)

**Ketua Penyunting**

Drs. Ahmad Eddison, M.Si (Dosen PPKn FKIP UNRI)

**Wakil Ketua Penyunting**

Sri Erlinda S.IP., M.Si (Dosen PPKn FKIP UNRI)

**Penyunting Ahli**

Prof. Drs. H. Suwardi MS (Guru Besar FKIP UNRI)

Prof. Drs. Suwarna Al Muchtar, SH, M.Pd (Dekan dan Guru Besar UPI Bandung)

Prof. Dr. M. Zen (Guru Besar UPI Bandung)

Prof. Dr. H. Waspodo (Guru Besar FKIP UNSRI)

Prof. Dr. Imran Manan, MA, MA (Guru Besar UNP Padang)

Dr. Gimin, M.Pd (Dosen FKIP UNRI)

Hj. Nurmi Chatim, SH (Dosen PPKn FKIP UNRI)

**Dewan Redaksi**

Drs. Zahirman, MH. (Dosen PPKn FKIP UNRI)

Drs. Hambali, M.Si (Dosen PPKn FKIP UNRI)

Jumili Arianto, S.Pd (Dosen PPKn FKIP UNRI)

Haryono, S. Pd (Dosen PPKn FKIP UNRI)

Supentri, S.Pd (Dosen PPKn FKIP UNRI)

**Staf Redaksi**

Separen, MH

**Alamat Redaksi** : Labor PPKn FKIP UNRI, Jl. Bina Widya Km. 12,5  
Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293 Phone : (0761)  
63267, Hp. 08127846827.  
Website: [jurnalpkn.yolasite.com](http://jurnalpkn.yolasite.com)  
email : [jurnal\\_pkn@yahoo.co.id](mailto:jurnal_pkn@yahoo.co.id)

Redaksi menerima naskah berupa Artikel Penelitian maupun Artikel Hasil Pengkajian, tulisan mengaju pada tema dan disajikan menurut sistematika

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas taufik, hidayah dan ridhonya yang telah memberikan kekuatan kepada kami Pengurus Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Hukum, sehingga Vol. 5 dapat diterbitkan sesuai rencana. Amanat Negara Republik Indonesia yang telah menetapkan dasar Negara yaitu Pancasila adalah merupakan suatu kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali untuk tetap menjaga dan melaksanakannya dalam segala segi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Menanggapi hal tersebut diatas, maka pemerintah Indonesia berdasarkan UU No 20/ Tahun 2003 dan UU Diknas No 232 / U / 2000 Pasal 10 ayat 1 dan SK No. 38/ Dikti/ Kep/ 2002, yang tetap mengisyaratkan untuk tetap mengabadikan PPKn sebagai mata kuliah wajib di segala jenjang pendidikan di Indonesia. Kobaran semangat PPKn sudah sepantasnya tampil di persada lautan ilmu pengetahuan yang berkolaborasi dengan ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial dari segala aspek pandang dan segala analisisnya, karena PPKn membutuhkan ruang lingkup pendidikan yang luas dan akurat.

Dengan terbitnya Vol 5 Jurnal PPKn dan Hukum (termasuk analisis ilmu-ilmu sosial secara multi aspek kemasyarakatan dan pembelajarannya) di harapkan PPKn dapat mewujudkan dan berfungsi sebagai PELITA BANGSA dan PELESTARI PANCASILA yang akurat dalam perjalanan sejarah pendidikan dan perjalanan hidup Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Amin....

Pekanbaru, Oktober 2010  
Ketua Penyunting,

**Drs. Ahmad Eddison, M.Si**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar Redaksi.....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>Teori Liberal Versus Teori Radikal</b>	
<i>Oleh : Dr. Alfitri, M.Si</i> .....	1
<b>Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Norma-Norma Pancasila Dapat Menunjang Pembangunan Nasional</b>	
<i>Oleh :Drs. Kamarudin, M.Si</i> .....	28
<b>Pembentukan Stereotip Terhadap Orang Kulit Hitam di Amerika Pada Masa Perbudakan</b>	
<i>Oleh: Jismulatif</i> .....	45
<b>Mutu dan Sumber Daya Manusia Pendidikan</b>	
<i>Oleh : Drs. Jaspas Jas, M.Pd.</i> .....	60
<b>Pelaksanaan Pembentukan Nilai-nilai Karakter Cerdas Secara Kolaboratif Antara Guru BK dan Guru KWN Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Di SMA N 1 Siak Hulu KabupatenKampar Tahun Pelajaran 2009-2010</b>	
<i>Oleh : Dra Elni Yakub MS dan Dra Sinar Hayati Ekawati, M.Pd</i> .....	69
<b>Koreksi Kehidupan Bernegara Dalam Puisi Malu Jadi Orang Indonesia Karya Taufik Ismail</b>	
<i>Oleh : Drs. Syafrial, M.Pd</i> .....	93
<b>Memahami UUD 1945 Dalam Realita Ketatanegaraan Indonesia</b>	
<i>Oleh : Supentri</i> .....	110
<b>Sistematika Penulisan</b> .....	133

EKONOMI POLITIK:

TEORI LIBERAL VERSUS TEORI RADIKAL

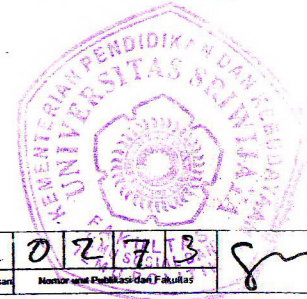
Dr. ALFITRI, M.Si.<sup>1</sup>

Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Sriwijaya

ABSTRACT

Political economic analysis focusing on how to understand the economic paradigm which substantially describes the growth and equity linked with the political paradigm that describes the achievement and the distribution of power. Dialectic theory has spawned a strong influence in the development of science, especially political economy approach in influencing state policy, as output in overcoming the various problems facing the country, including strategic issues. One application of the new political economy, especially by public choice perspective is the study Samuel L. Popkin who want to bridge the thinking of neoclassical economists to be applied in nonmarket contexts.

Kata Kunci: *Ekonomi, Politik*



0	8	0	2	0	6	0	1	1	0	0	2	2	2	7	3	
Kode Fakultas	Kode PS/Bagian	Kode Publikasi	Kode Penulis	Tahun Publikasi	Kode Sumber Tuisan	Nomor and Publikasi dari Fakultas										

<sup>1</sup> Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Sosiologi Pembangunan pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

**A. Perspektif Ekonomi Politik**

Kajian ekonomi politik adalah studi tentang teori sosial dan keterbelakangan yaitu mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial: hubungan antara politik dan ekonomi. Pada awalnya ekonomi politik dimaksudkan untuk memberikan saran mengenai berbagai masalah ekonomi kepada penyelenggara negara, namun dalam perkembangan selanjutnya lebih diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap proses politik (Deliarnov, 2006:8). Analisis ekonomi politik menekankan pada bagaimana memahami paradigma ekonomi yang secara substansi menjelaskan tentang pertumbuhan dan pemerataan dikaitkan dengan paradigma politik yang menjelaskan tentang pencapaian dan distribusi kekuasaan.

Penggabungan analisis politik dalam kajian ekonomi dan analisis ekonomi dalam kajian politik saat ini

sangat diperlukan, sebab dengan bekal ilmu ekonomi atau ilmu politik saja, sering menemui kesulitan dalam menjelaskan berbagai gejala dan masalah yang dihadapi. Misalnya masalah kemiskinan yang dihadapi oleh suatu negara ternyata tidak dapat diatasi melalui pendekatan ekonomi semata, namun terkait juga dengan politik dan hukum, bahkan juga dengan budaya dan agama. Hal ini berarti memadukan dua pendekatan: ekonomi politik adalah untuk mencari solusi yang tepat dalam menghadapi berbagai persoalan yang mengemuka di masyarakat melalui pendekatan multidimensional yakni ekonomi dan politik.

Bagaimana hubungan antara ekonomi dan politik sangat jelas terlihat pada saat Indonesia dan negara-negara Asia ditimpa krisis tahun 1997/1998. Krisis yang dipicu oleh masalah moneter berubah menjadi

krisis ekonomi yang bercampur baur dengan krisis politik dan moral, karena implikasi dari krisis ekonomi tidak berhenti pada kesulitan ekonomi yang melanda semua lapisan masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup, namun yang justru lebih menarik adalah keruntuhan suatu rejim politik akibat keterpurukan ekonomi. Jika kasus Indonesia diambil sebagai contoh, menjadi sangat jelas jika krisis ekonomi yang melanda negara ternyata memicu kerusuhan sosial yang menuntut ketidakberhasilan pemerintah itu dengan sebuah implikasi politik "menurunkan rejim yang memerintah (Soeharto) saat itu" dari panggung politik negara melalui gerakan reformasi.

Gelombang reformasi ini adalah sebuah gerakan yang menuntut perubahan sistem ekonomi dan sistem politik yang dituduh sebagai biang krisis. Krisis yang dihadapi oleh bangsa

Indonesia pada saat itu tidak semata-mata disebabkan faktor ekonomi, tetapi dipengaruhi juga oleh dimensi lain seperti politik dan hukum. Dimensi politik dan hukum ini berkaitan dengan kekuasaan otoriter dan ketidakberdayaan hukum, sehingga merambah ke ranah ekonomi yang dibuktikan pada menurunnya investasi dan produksi. Gejala ini justru memicu perlawanan rakyat yang dipelopori oleh kelas menengah yang menuntut adanya perubahan politik dalam waktu yang singkat, sehingga pilihan reformasi dianggap dapat menyelesaikan persoalan. Jadi analisis ekonomi politik adalah sebuah pilihan rasional yang dapat dijadikan alat melakukan studi terhadap permasalahan kompleks yang dihadapi secara multidimensi. Dimensi ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan dan pembangunan akan selalu berkaitan dengan dimensi politik tentang kekuasaan.

Pada satu sisi pemenuhan ekonomi mengacu kepada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Paham pertumbuhan digunakan dalam teori dinamika sebagaimana dikembangkan oleh pemikir Neo-Keynes dan Neo-Klasik, sedangkan pembangunan ekonomi memiliki arti yang jauh lebih luas dan mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh (Damanhuri, 2010:2-3). Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Pada sisi politik berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang berimplikasi pada produk kebijakan negara. Kebijakan negara adalah sebuah keputusan politik yang dibuat

berdasarkan mekanisme politik agar roda pembangunan dapat berjalan sesuai dengan koridor politik. Artinya muara kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh negara adalah suatu produk politik untuk mengatur ketertiban sosial dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Oleh karena itu kebijakan negara yang menyangkut dimensi ekonomi dan politik selalu berkaitan dengan ideologi yang berkembang di dunia yang selalu diwarnai oleh pertarungan dua kubu teori yaitu kubu liberal dan kubu radikal. Pertarungan ini tidak hanya menyangkut perdebatan teori secara akademik tetapi seringkali menjadi pertarungan praksis yang menjadi sentral penentuan kebijakan negara dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini berarti ada ideologi yang bekerja secara abstraks yang mengatur dan membimbing suatu negara dalam menentukan pilihan

praksisnya. Hal inilah menjadi ranah pertarungan antara negara maju dan negara berkembang sebagai sebuah pergolakan yang tiada habisnya. Sejak jaman *renaissance*, yang melahirkan paham liberal di benua Eropa telah mendorong munculnya penjajahan negara empirialis terhadap negara yang dianggap tidak bertuan, sehingga konsep kolonialisme menjadi pembenaran terhadap eksploitasi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang menjadi penyebab utama keterbelakangan di negara dunia ketiga, dan sebaliknya menjadi ladang bagi negara Eropa untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran rakyatnya.

### B. Pendekatan Teori Liberal

Teori liberal merupakan teori yang sangat dominan dalam mewarnai pembangunan ekonomi di dunia. Peletak dasar teori liberal antara lain Adam Smith, David Ricardo, T.R.

Malthus dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para pengikutnya seperti W.W. Rostow, Harold dan Dommar, serta lainnya.

Teori liberal sebenarnya bermula dari teori yang digagas oleh Adam Smith dari madzhab klasik. salah satu gagasannya adalah harus ada kebebasan bagi setiap individu untuk bertindak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri. Pemerintah tidak perlu melakukan intervensi terhadap jalannya sebuah perekonomian. Menurut Smith, akan ada sebuah kekuatan (*invisible hand*) yang akan mengatur sebuah perekonomian berjalan lancar dan sehat. Dalam konteks ekonomi politik dan pembangunan, menurut teori liberal, keterbelakangan identik dengan ketertinggalan. Ketertinggalan tersebut dapat dikejar dengan strategi tertentu dan dalam waktu tertentu.

Ada dua strategi besar yang ditawarkan oleh teori liberal,

(Damanhuri, 2010:14) yaitu: 1) *High Economic Growth*, yaitu strategi yang fokus pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja. Pemerataan akan tercapai dengan sendirinya serta berjalan beriringan mengikuti pertumbuhan ekonomi yang ada. Menurut pandangan ini, pertumbuhan yang tinggi akan menimbulkan tetesan ke bawah bagi masyarakat (*trickle down effect*)., 2) *International Free Trade*, diharapkan terjadi *transfer of capital, technology and know how* dari negara maju ke negara sedang berkembang melalui perusahaan multinasional. Keberadaan perdagangan bebas internasional diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dari industri lokal sehingga mampu bersaing dalam pasar global.

Secara garis besar ada tiga ciri mendasar teori liberal sebagaimana yang dirumuskan oleh Damanhuri (2010:15-16) yaitu: 1) Pengakuan terhadap hak-hak pribadi, yaitu setiap individu diberi kebebasan untuk memiliki sekaligus mengelola sumberdaya ekonomi untuk kepentingan mereka. Pengakuan luas terhadap hal-hak pribadi dapat dilihat dari pemilikan alat produksi di tangan perorangan., 2) perekonomian diatur menurut mekanisme pasar, yang berarti campur tangan pemerintah seminimal mungkin, karena ada tangan yang tidak kelihatan (*invisible hand*) yang akan membawa perekonomian ke arah keseimbangan. Jika terjadi banyak campur tangan pemerintah, pasar justru mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada inefisiensi dan ketidakseimbangan., 3) Motif penggerak roda perekonomian adalah motif laba, dalam arti mementingkan diri sendiri dan memperhatikan kepentingan orang lain. Menurut J.S. Mill, orang bisa saja bersaing di sektor produksi dan bersifat sosial di bidang distribusi pendapatan.

Beberapa contoh teori liberal seperti teori "lingkar setan kemiskinan" Ragnar Nurkse, teori pertumbuhan ekonomi lewat perdagangan internasional, teori neoliberal dan teori "lepas landas" dari W.W. Restow. Teori tersebut menekankan pada faktor internal seperti pertumbuhan ekonomi, ekonomi pasar, pembentukan modal dan industrialisasi di daerah. Hal ini sangat berbanding terbalik jika dikaji melalui teori radikal yang lebih cenderung pada faktor eksternal. Teori radikal mengkritik dengan menyatakan bahwa pembangunan kapitalis bukanlah pembangunan yang sebenarnya.

### C. Pendekatan Teori Radikal

Teori radikal muncul sebagai kritik terhadap teori liberal. Menurut pandangan teori radikal, pembangunan kapitalis bukanlah pembangunan yang sebenarnya, melainkan hanya sebagai

suatu tahap perkembangan sosial saja, yang nanti akan berakhir lewat suatu revolusi sosial untuk menghancurkan sistem kapitalis itu sendiri (Damanhuri, 2010:41). Menurut Swasono, (dalam Deliarnov, 2006:77), teori radikal atau teori strukturalis adalah paham yang menolak ketimpangan struktural sebagai sumber ketidakadilan sosial-ekonomi, sebagaimana dianut oleh Neoklasik yang ditandaskan pada prinsip kepentingan pribadi, mekanisme pasar bebas, persaingan ketat, dan pengutamaan pertumbuhan dibanding pemerataan. Lebih lanjut dikatakan bahwa strukturalisme berorientasi pada strukturisasi dan restrukturisasi ekonomi disertai intervensi dan pengontrolan mekanisme pasar sehingga tidak saja menghasilkan "nilai tambah ekonomi" tetapi juga nilai tambah "sosiokultural" yang menjangkau makna partisipasi dan emansipasi kemartabatan.

Secara umum ada beberapa kritikan yang dikemukakan oleh para pengusung teori radikal (marxisme-komunisme)<sup>2</sup> terhadap teori liberal kapitalisme, yaitu (Damanhuri, 2010:42): 1) keterbelakangan yang terjadi di negara dunia ketiga akibat ekspansi kapitalisme. Ekspansi ini berbentuk imperialisme atau kolonialisme yang terjadi sebelum perang dunia II dan dalam bentuk neo-kolonialisme dan neo-imperialisme., 2) proses pemiskinan dan proletarisasi massa terjadi di negara dunia ketiga akibat penghisapan oleh kaum borjuis melalui transfer nilai surplus produksi dari proses kapitalisasi kaum kapitalis., 3) proses ketergantungan permanen dalam hal modal dan teknologi

<sup>2</sup> Istilah ekonomi politik yang digunakan dalam teori Marxian tidak merujuk pada pemikiran tentang hubungan ekonomi dengan politik, melainkan merujuk pada sebuah cara berfikir tentang perekonomian yang didasarkan pada metode dan teori dari pemikir ekonomi klasik terutama Adam Smith dan David Ricardo. Metode ini menekankan pada ide bahwa perekonomian pasar bekerja menurut prinsip yang reproduksi dan ekspansi sistem kesalingtergantungan material antar orang (pembagian kerja sosial) (Caporaso, 2008:124).

diakibatkan oleh negara metropolis (pusat kapitalis dunia) yang secara terus-menerus mempertahankan hegemoni dan supremasi ekonomi, politik, dan militer terhadap negara pinggiran (*peripheries*).

Ciri-ciri teori radikal dapat digambarkan pada teori Marxisme-Komunisme yang menjadi dasar pembangunan sosialisme-komunis, yaitu: 1) lebih mengutamakan rasa kebersamaan atau kolektivisme. Menurut padangan teori ini, harta dan alat produksi adalah milik semua, yang bisa didistribusi untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing, 2) lebih mementingkan unsur kooperatif daripada motif laba atau kepentingan pribadi. Di sini pemerintah membatasi para individu sesuai dengan keinginannya masing-masing. 3) Adanya campur tangan pemerintah yang sangat kuat mulai dari

tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan.

Teori Sosialisme-Demokrat adalah teori yang mendasari adanya pembangunan "model negara kesejahteraan" (*welfare state model*) dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) Adanya serikat buruh yang kuat, mampu menghadapi kaum pemilik modal, yang membuat buruh memiliki *bargaining* yang kuat di hadapan para pemilik modal. Dengan demikian kesejahteraan mereka menjadi terjaga dan terhindar dari eksploitasi yang berlebihan dari kaum pemilik modal., 2) pembentukan sistem jaminan sosial untuk seluruh penduduk mencakup berbagai jaminan sosial (kesehatan dan pendidikan gratis), pendapatan minimum, kecelakaan kerja dan pensiun., 3) penerapan pajak progresif bagi perusahaan dan perorangan sebagai instrumen penciptaan pemerataan pendapatan., 4) gerakan

koperasi sebagai instrumen bagi masyarakat menengah ke bawah untuk mengorganisasikan pemberdayaan ekonominya demi kesejahteraan mereka sendiri. 5) peran negara dan pasar berjalan seimbang bersama-sama menjadi instrumen untuk mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan.

Beberapa contoh pendekatan teori liberal yaitu: 1) teori surplus values, 2) teori dependensia (*neo-marxisme*), 3) teori sosialisme-demokrat, 4) teori imperialisme atau neo-imperialisme.

Dari dua pendekatan teori liberal dan teori radikal, dapat dilihat benang merahnya dalam sistem ekonomi yang mencakup keseluruhan proses aktivitas masyarakat dalam upaya mengatasi masalah ekonomi sekaligus mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan politik. Menurut Gregory & Stuart (dalam Deliarnov, 2006:4), sistem ekonomi



mencakup mekanisme, pengaturan organisasi, dan aturan yang membuat dan melaksanakan keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas jumlahnya.

Klasifikasi pertama, organisasi pengambilan keputusan, suatu perekonomian disebut terpusat jika keputusan ekonomi ditentukan oleh level yang lebih tinggi (negara dan otoritas pusat) sebaliknya jika disebut terdesentralisasi, keputusan ekonomi lebih banyak dilaksanakan oleh level dan unit ekonomi yang lebih rendah (rumah tangga dan perusahaan individu) yang relatif bebas dari otoritas pusat.

Klasifikasi kedua, yaitu mekanisme penyebaran informasi dan koordinasi keputusan ekonomi, apabila keputusan dilaksanakan sesuai instruksi atau komando dari suatu badan pemerintah. Suatu sistem ekonomi disebut sistem pasar jika

penyebaran informasi dan koordinasi keputusan ekonomi melalui mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran tanpa ada campur tangan pemerintah.

Klasifikasi ketiga tentang hak pemilikan kekayaan produktif, yaitu yang dimiliki oleh privat, seperti yang dijumpai dalam sistem kapitalisme, dimiliki publik (negara) dan milik kolektif atau kooperatif. Di negara komunis seperti negara bekas Uni Soviet, umumnya kekayaan produktif adalah milik negara, tetapi di negara yang lebih lunak seperti Hongaria, kekayaan kolektif merupakan milik kolektif.

Klasifikasi sistem insentif digunakan materi dan moral. Dalam ekonomi pasar lebih banyak digunakan insentif ekonomi, sedangkan dalam sistem perencanaan, selain insentif materi juga digunakan insentif moral. Dalam kerangka pemikiran Marx, balas

jasa materi masih perlu digunakan pada berangsur-angsur insentif materi tahap awal sosialisme. Akan tetapi digantikan oleh insentif moral. Secara pada tahap yang lebih tinggi, konseptual, klasifikasi sistem ekonomi komunisme, di mana orang sudah dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini. hidup secara berlimpah, maka secara

Tabel 1. Klasifikasi Sistem ekonomi

Klasifikasi	Kapitalisme	Sosialisme Pasar	Sosialisme
Organisasi pengaturan pengambilan keputusan	Lebih terdesentralisasi	Lebih terdesentralisasi	Lebih terpusat
Mekanisme penyebaran informasi & koordinasi	Lebih ditentukan oleh pasar	Lebih ditentukan oleh pasar	Dominan
Pemilikan kekayaan Produktif	Dominan privat	Dominan negara dan/atau kolektif	Dominan negara
Sistem insentif	Dominan materi	Materi & moral	Materi & moral

Sumber: Gregory & Stuart dalam Deliamov, 2006.

**D. Pertarungan Teori Liberal dan Radikal**

Secara konvensional, ada dua kutub sistem ekonomi politik yaitu sistem kapitalisme dan sistem sosialisme. Pembagian anatomis ini dapat dilakukan berdasarkan sifat-sifat dasar dari sistem tersebut, terutama sifat dari mekanisme pasar, insentif pendirian badan usaha dan motif mencari keuntungan. Sistem kapitalisme mengakomodasi sifat dasar tersebut sehingga peranan institusi

pasar dan swasta dominan. Sebaliknya, sistem sosialisme lebih mementingkan negara, tetapi memberikan ruang gerak yang amat sedikit terhadap institusi pasar, ada motif mencari keuntungan, dan peranan swasta (Rachbini, 2005:11).

Di dalam sistem kapitalisme, pemilikan (*ownership*) terletak di tangan individu yang digunakan untuk tujuannya sendiri yakni mencari keuntungan. Individu juga dapat mengambil inisiatif membentuk dan

mengembangkan perusahaan, baik dilakukan secara partnership atau korporasi. Peranan pemerintah hanya terbatas untuk melakukan kontrol dan mengikuti perkembangannya agar tidak terjadi kegagalan pasar. Kesenjangan distribusi pendapatan adalah salah satu kelemahan di dalam pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di dalam sistem kapitalisme. Pertumbuhan ekonomi mungkin hanya dinikmati kelompok pemilik modal besar yang muncul sebagai pemenang dalam persaingan pasar. Sementara, kelompok ekonomi lemah tertinggal, bahkan tersingkir karena tidak mampu bersaing dengan skala usaha besar yang sangat efisien dari kelompok ekonomi kuat (Rachbini, 2006:15).

Di dalam sistem ekonomi sosialisme, kelompok industri dasar dan sumber daya yang menyangkut kepentingan rakyat banyak dimiliki oleh negara. Sisanya menjadi milik

individu dan diusahakan secara perorangan melalui badan usaha yang ada. Insentif bersifat sangat terbatas dan tidak bebas seperti negara kapitalisme. Aktivitas produksi bermotifkan faktor ekonomi dan nonekonomi. Sementara mekanisme berlakunya harga komoditi banyak dipengaruhi oleh aturan pemerintah dan sedikit sekali pengaruh hukum permintaan dan penawaran. Di sini peranan pemerintah cukup besar, terutama sektor produksi strategis yang merupakan tumpuan masyarakat banyak. Ada kompetisi pasar sepanjang pemerintah membiarkannya terhadap pasar komoditi tertentu (Rachbini, 2006:18).

Pertarungan kedua sistem ekonomi ini tidak terlepas dari substansi teori liberal dan teori radikal yang menjadi ruh masing-masing pendekatan. Dialektika teori telah melahirkan pengaruh kuat dalam

perkembangan ilmu pengetahuan, terutama pendekatan ekonomi politik dalam mempengaruhi kebijakan negara, sebagai *output* dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi negara, termasuk masalah strategis. Oleh karena itu dalam aplikasi teori, yang menuntut solusi

masalah pembangunan baik di negara maju maupun negara dunia ketiga, kedua ideologi tersebut saling memberikan warna dalam bentuk kritik teori, seperti yang tergambar dalam perbandingan teori ditinjau dari kelebihan dan kelemahan tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Perbandingan Teori Liberal-Teori Radikal

		Teori Radikal	
Kekuatan	Kelemahan	Kekuatan	Kelemahan
Memberi ruang individu untuk berperilaku inovatif, kreatif, interpreneur	Bias terhadap pengalaman sejarah	Kritik teori radikal: sistem ekonomi liberal pada dasarnya busuk dari dalam	Dalam mencapai cara revolusi kurang mempertimbangkan kondisi struktural dan kultural NSB
Menekankan prinsip efisiensi, efektivitas. clean & good governance	Pendekatan linear, penyeragaman, dan homogenisasi dalam rekayasa sosekopol	Konsen terhadap perwujudan pemerataan dan keadilan	Komunis runtuh di mana-mana, karena perbedaan konteks historis
Menekankan pada persiangan, kualitas tinggi, pemikiran, dan aksi	Menghancurkan nilai lokal, tradisional, peran agama, dan keluarga luas	Memberi inspirasi perbaikan dalam kapitalisme yang makin manusiawi	NSB mampu melepaskan ketergantungan dan menjadi negara maju
Memberi iklim pengembangan riset dan iptek	Kurang apresiasi prinsip kerjasama & saling percaya	Menjelaskan persepektif struktural dalam membedah kelemahan dan menyusun agenda perbaikan	
Menjamin kebebasan, pluralitas, dan supremasi hukum, regulasi dan standarisasi	Over optimistik dalam peramalan ekonomi maupun politik		

konsisten dengan preferensi publik. Ketika keputusan dibuat dalam kelompok lewat prosedur demokratis, tidak akan dengan sendirinya muncul sebuah fungsi kesejahteraan sosial yang mengekspresikan preferensi kolektivitas sebagai suatu keseluruhan dan sesuai dengan persyaratan konsistensi yang dibuat untuk perangkingan preferensi individu. Penjelasan pilihan rasional bisa gagal pada level sistem politik, baik karena agen kolektif tidak bertindak rasional atau karena ide tentang rasional untuk kolektivitas itu sendiri tidak utuh.

Ada beberapa implikasi bagi penerapan pilihan publik, pertama, perlu reformasi kelembagaan publik, yaitu reformasi aturan dan kerangka dasar di mana proses dan pengambilan keputusan berlangsung, kedua, perlu desentralisasi kekuasaan dan kewenangan politik, sebab tatanan seperti transaksi pasar dipandang lebih

baik dibanding tatanan dominasi kekuasaan, ketiga perlu dilakukan reorganisasi aturan perdagangan, kontrak, dan persetujuan.

Salah satu aplikasi ekonomi politik baru, khususnya menurut perspektif pilihan publik adalah hasil studi Amuel L. Popkin yang ingin menjembatani pemikiran para ahli ekonomi neoklasik untuk diterapkan dalam konteks nonpasar. Menurut Popkin, aliran ekonomi moral keliru baik dalam penggambaran masyarakat petani prakolonial maupun dalam analisis tanggapan petani terhadap kapitalisme. Aliran ini keliru membayangkan sifat revolusi petani dan menyesatkan para pembuat kebijakan (Staniland, 2003:60).

Popkin mengklaim bahwa teori pengambilan keputusan individual pada pedesaan, dapat mulai mengembangkan sebuah pemahaman deduktif tentang institusi petani dan menggerakkan

analisis mundur satu langkah ke tingkat individu. Dengan menggunakan konsep pilihan dan pengambilan keputusan individual, dia membahas bagaimana dan mengapa kelompok individual memutuskan untuk mengadopsi beberapa kumpulan norma sambil menolak yang lain. Tabel berikut menggambarkan perbedaan petani ekonomi moral dengan petani rasional.

Tabel 4. Perbedaan Petani Ekonomi Moral dengan Petani Rasional

	Ekonomi Moral	Petani Rasional
Pertanian	Subsisten	Modern
Landasan Aksi	Emosional	Rasional
Orientasi	Ke dalam	Ke dalam dan ke luar
Prinsip Usaha	Mengutamakan keselamatan	Memaksimalkan keuntungan
Sikap terhadap Resiko	Enggan mengambil Resiko	Berani mengambil Resiko
Sikap terhadap Inovasi	Enggan menerapkan inovasi baru	Berani menerapkan Inovasi
Yang diutamakan	Kepentingan Kolektif	Kepentingan Individu

Sumber: Deliarnov, 2006.

Hasil penelitian Popkin di Vietnam membuat kesimpulan yang bersifat antitesis terhadap pandangan Scott sebagai pelopor ekonomi moral. Kalau Scott mengatakan bahwa petani di Asia Tenggara memiliki sikap lebih mengutamakan keselamatan dibanding memperoleh laba maksimum serta berorientasi pada kelompok, Popkin justru berpendapat petani tradisional termotivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, bukan kelompok. Temuan ini juga merupakan perarungan ideologi liberal dan sosialisme yang ternyata juga diperdebatkan oleh Popkin dan Scott. Yang menarik dari kajian Scott dan Popkin adalah persingungan permasalahan yang dihadapi petani Indonesia yang sebagian besar masih diliputi oleh penyakit kemiskinan. Kajian ekonomi politik akan dapat

memberikan jawaban, apakah urbanisasi sebagai implikasi dari kemiskinan petani disebabkan oleh industrialisasi yang bermuara pada perilaku petani, atau ada faktor lain yang membelenggu lingkaran setan kemiskinan petani.

#### F. Problem Empiris Ekonomi Politik Indonesia

Masalah dan tantangan ekonomi politik dapat di eksplorasi menjadi beberapa pokok pikiran, yaitu:

- 1) globalisasi menuntut negara sedang berkembang untuk mengejar ketertinggalan dengan negara maju, baik dari sisi pendapatan negara, sistem politik, dan sosial kemasyarakatan,
- 2) kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan adalah masalah terbesar dalam upaya mengejar ketertinggalan,
- 3) industrialisasi, pertanian, dan informalisasi ekonomi merupakan masalah yang menyangkut skill tenaga kerja kurang memadai, masalah di sektor pertanian, dan masalah

industrialisasi yang bermuara pada informalisasi perekonomian,

- 4) korupsi, kebocoran, dan inefisiensi yang telah menggurita dalam tubuh pemerintahan, parlemen, sistem peradilan maupun di masyarakat melahirkan ekonomi biaya tinggi,
- 5) Utang luar negeri adalah beban bagi negara dan ketergantungan terhadap negara maju,
- 6) lingkungan (ekologi) yang menimbulkan pencemaran lingkungan, *global warning* telah mengakibatkan eksternalitas negatif yang membahayakan kelangsungan makhluk hidup termasuk manusia,
- 7) birokrasi, yang buruk dan penuh dengan nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme, merupakan tuntutan publik yang harus dibenahi (Damanhuri, 2010:8-9).

Ketujuh masalah besar tersebut merupakan problema yang dihadapi Indonesia dalam pembangunan bangsa

sekarang dan masa yang akan datang hingga kuartal kedua tahun 2009

Jika dilihat dari karakter masalahnya, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Faktanya bagian penting dalam menemukan krisis keuangan global masih solusi yang tepat dalam mengatasi memberikan pengaruh yang buruk persoalan. Berdasarkan pendekatan terhadap beberapa sektor, seperti ekonomi politik sisi produksi menjadi perdagangan, hotel, dan restoral, point penting dalam melihat komponen manufaktur, dan pertanian. Sementara pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan itu sektor lainnya terlihat sukses dalam kajian Pande Raja Silalahi (Analisis memperlihatkan kinerja pertumbuhan CSIS, 2009), sisi produksi PDB yang stabil. Bahkan, pertumbuhan Indonesia meunjukkan adanya tren positif terjadi pada sektor listrik, gas, penurunan mulai dari kuartal pertama dan air. (lihat Tabel. 5).

Tabel 5. Komponen Pertumbuhan Ekonomi: Sisi Produksi (y-o-y) (dalam persen)

Pertumbuhan Ekonomi	2008				2009		
	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3
Pertanian	6.3	4.8	3.4	4.7	4.8	2.4	2.2
Pertambangan dan Penggalian	-1.7	-0.5	2.1	2.1	2.2	2.4	2.2
Manufaktur	4.3	4.4	4.3	4.9	1.6	1.5	1.7
Listrik, Gas dan Air	12.4	11.8	10.4	9.3	11.4	15.4	15.5
Konstruksi	8.0	8.1	7.6	5.7	6.3	6.4	6.5
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	6.9	8.1	8.4	5.6	0.6	-0.1	1.6
Transportasi dan Komunikasi	18.3	17.3	15.5	15.8	16.7	17.5	16.5

Keuangan, Bisnis dan Persewaan	8.3	8.7	8.6	7.4	6.3	5.3	5.6
Jasa	5.9	6.7	7.2	6.0	6.8	7.4	6.6
PDB	6.2	6.4	6.4	5.2	4.4	4.0	4.2

Sumber: Bank Indonesia, dalam Analisis CSIS, 2009.

Data di atas juga menunjukkan bahwa sektor transportasi dan komunikasi, merupakan sektor yang memperlihatkan sektor yang stabil selama tahun 2008-2009 dan sektot ini juga menunjukkan pertumbuhan tertinggi sebesar 16,5 persen pada kuartal ketiga tahun 2009 berdasarkan perubahan secara tahunan. Akan tetapi, secara umum pertumbuhan ekonomi atau PDB dari sisi produksi di Indonesia berhasil menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil dan positif pada kuartal ketiga tahun 2009.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil adalah fakta yang mendukung kestabilan politik. Namun kenyataannya kestabilan politik dan ekonomi tidak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

secara merata. Ada masalah distribusi pendapatan yang bermuara kepada ketimpangan dan keterbelakangan. Oleh sebab itu ranah politik menjadi penting dikaitkan agar dinamika poliuk dapat diukur sebagai salah satu parameter peningkatan kesejahteraan.

Dipandang dari kerangka atau sistem politik, kedudukan politisi dalam lembaga legislatif berada dalam elemen struktur kepartaian. Dalam sistem banyak partai, dan yang pembentukannya dilakukan dengan tergesa-gesa, kinerja sistem politik sulit diharapkan akan dapat didorong dengan kuat melalui kualitas politisi yang duduk dalam lembaga legislatif. Secara kelembagaan, elite politik saat ini umumnya tidak mempunyai ruang bebas yang memadai untuk

mengekspresikan energi kreativitas dan idealisme untuk diarahkan pada kemajuan masyarakat. Dalam banyak kasus kepentingan partai politik oleh para politisi masih lebih menonjol dibanding kepentingan masyarakat banyak. Sebut saja misalnya dana aspirasi, rumah aspirasi, dan yang terakhir usulan DPR RI untuk membangun gedung baru dengan biaya 1.6 Triliun rupiah memberikan simbol bahwa politisi yang duduk mewakili rakyat melalui pesta demokrasi ternyata selalu memperjuangkan kepentingan pribadi dan partainya, sehingga harapan rakyat terhadap perubahan nasib tentang peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masih menjadi impian.

Tabel 6. Sistem dan Dinamika Politik Menurut Arah dan Dinamika Pembentuknya

Ke Arah Regresif (Mundur/terbelakang)	Elemen Sistem Politik	Ke Arah Progresif (Maju)
Banyak partai dan tidak efektif	Struktur kepartaian	Multi partai sederhana dan efektif
Askriptif-primordial yang terbelakang	Budaya politik	Orientasi prestasi-rasional yang progresif
Paternalistik-feodalistik-romantik	Pola kepemimpinan	Demokratik-kharismatik-rasional
Timpang/polaristik-sentralistik	Struktur sosial-budaya	Egaliter/stratifikatif-desentralistik
Ekklusif ( <i>elit centris</i> ) dan <i>bad accountability</i>	Pembentukan kebijakan publik dan perundang-undangan	Inklusif ( <i>people oriented</i> ) dan <i>good accountability</i>

Sumber: Analisis CSIS, 2009.

Tabel di atas menggambarkan ekonomi, baik pada tingkat global tentang dinamika politik. Dinamika politik Indonesia masih berada di tengah badai krisis multidimensi dan selamanya berlangsung liner (kearah

yang progresif) atau searah dengan keinginan. Dibandingkan dengan Pemilu 1999 dan 2005, banyak pakar menilai bahwa penyelenggaraan Pemilu legislatif saat ini bersifat regresif. Dengan kata lain Pemilu kali ini (2009) lebih buruk dibandingkan dua penyelenggaraan Pemilu sebelumnya (1999-2005). Tampaknya indikasi proses tersebut belum menunjukkan ke arah progresif.

Dampak terhadap kajian ekonomi politik dapat dilihat dari berbagai produk kebijakan publik yang justru tidak memihak kesejahteraan rakyat. Undang-undang penanaman modal, Undang-undang sumber daya air dan kebijakan investasi terhadap sumber daya alam semakin jauh terhadap azas keadilan yang diinginkan dalam UUD 1945 Pasal 33. Pada masa Soeharto, perekonomian Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 yang menganut sistem dengan

landasan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan atau koperasi, tetap dengan ideologi Pancasila. Pada era ini, kekuasaan negara atas sumber kekayaan alam diwujudkan dalam bentuk pendirian badan usaha milik negara (Asshiddiqie, 2010:221). Namun dalam perkembangannya, kebijakan privatisasi BUMN telah menggeser kepemilikan negara terhadap aset yang diserahkan kepada kekuatan ekonomi pasar. ini adalah ciri ekonomi liberal yang mulai menggeser peran negara dalam sektor ekonomi publik. Jika kebijakan liberal makin mendominasi, maka konsekuensinya badai ketimpangan akan semakin keras menimpa rakyat yang semakin hari makin dirundung kesulitan ekonomi. Fakta memang menunjukkan kekuatan fondasi ekonomi, akan tetapi persoalan kesenjangan dan kemiskinan masih menjadi momok dan siap menerpa rakyat yang makin sulit dalam

menjalani kehidupan sehari-hari. Fenomena negara berkembang semakin jelas terlihat pada konteks permasalahan lokal.

### G. Pertarungan di Tingkat Lokal

Salah satu tujuan desentralisasi adalah terciptanya *political equality* di tingkat lokal (Smith dalam Prasajo, 2010:145). *Political equality* dalam desentralisasi merupakan kontribusi dari penguatan demokrasi lokal di mana masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memberikan suaranya dalam pemilihan dan pengambilan keputusan, membentuk asosiasi politik, dan menggunakan hak kebebasan berbicara. Kesempatan berpartisipasi yang lebih besar bagi masyarakat merupakan konsekuensi logis dari perpindahan lokus pengambilan keputusan dari pemerintah nasional ke pemerintah lokal.

Relasi antara negara dan masyarakat dalam konteks *political equality* penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan refleksi daya tawar masyarakat terhadap berbagai keputusan yang diambil oleh lembaga formal pemerintahan. Masyarakat adalah pemilik kedaulatan sekaligus pemilik otonomi sehingga keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dan memberikan suaranya. Oleh karena itu menurut Prasajo (2010:147), desentralisasi tidak dimaksudkan memberikan otonomi kepada pemerintah daerah, tetapi lebih dari itu harus memperkuat peran dan kedudukan warga masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Kondisi politik lokal yang sangat heterogen, kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat yang

rendah serta buruknya sistem pencatatan kependudukan dan penyelenggaraan pemilihan (*electoral governance*) seringkali menyebabkan kegagalan tujuan pilkada langsung. Implikasi dari kegagalan tersebut tercermin dari data lapangan terhadap produk kebijakan lokal yang justru tidak menguntungkan masyarakat.

Tabel 7. Luas Tanaman Karet & Kelapa Sawit di Sumatera Selatan

Kabupaten/Kota	Karet (Luas ha & Produksi ton)				Sawit (Luas ha & Produksi ton)			
	Besar	Rakyat	Besar	Rakyat	Besar	Rakyat	Besar	Rakyat
Ogan Komering Ulu	3.374	66.487	789	57.968	38.802	17.241	42.004	41.099
Ogan Komering Ilir	15.457	110.163	19.617	89.820	99.369	75.292	112.407	244.857
Muara Enim	7.379	178.493	3.847	214.577	63.593	25.250	107.943	57.559
Lahat	5.512	22.523	2.377	15.000	40.900	15.188	107.363	32.043
Musi Rawas	1.357	232.425	0	128.829	94.930	30.457	220.901	78.934
Musi Banyuasin	4.758	154.236	2.105	107.177	141.927	68.674	252.579	164.247
Banyuasin	19.635	83.481	17.287	97.636	93.698	49.311	155.025	123.886
OKU Selatan	0	3.072	0	43.842	0	0	0	0
OKU Timur	0	60.586	0	43.842	25.843	6.031	29.318	13.263
Ogan Ilir	9.520	20.573	19.417	14.014	6.825	7.125	22.100	16.150
Palembang	0	0	0	0	0	0	0	0
Prabumulih	0	18.376	0	16.524	0	1.120	0	3.672
Pagar Alam	0	1.210	0	69	0	0	0	0
Lubuk Linggau	0	10.426	0	2.469	0	60	0	11
Empat Lawang	0	3.705	0	0	0	0	0	0
Jumlah		1.032.748		853.786		901.635		1.825.360

Sumber: Dinas Perkebunan Sumsel, Jelajah Musi, Kompas, 2008.

Tabel 7. di atas mengisyaratkan kesenjangan kepemilikan lahan antara perkebunan besar dengan rakyat. Luas lahan dan produksi dua komoditi unggulan di Sumatera Selatan sangat berpihak kepada perusahaan perkebunan besar. Investasi

perkebunan besar melalui perusahaan nasional dan multinasional di daerah ini telah menimbulkan persoalan ekonomi, politik, sosial, budaya.

Hal yang paling menonjol adalah penguasaan lahan perkebunan sawit oleh korporasi telah menggeser

kepemilikan lahan petani menjadi buruh tani. Bahkan dalam berbagai kasus pengusuran lahan telah bermuara kepada konflik laten antara perusahaan dengan rakyat. Ironisnya konflik juga terjadi secara vertikal antara rakyat dan aparat keamanan yang menjadi alat pengamanan perusahaan perkebunan. Kasus petani desa Rengas di Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir merupakan masalah serius dalam analisis ekonomi politik di tingkat lokal. Kekuatan pemerintah telah memberangus hak petani atas tanah melalui kekuatan politik dan keamanan yang mengakibatkan hilangnya alat produksi rakyat. Secara ekonomi justru melahirkan kesenjangan permanen yang menurunkan daya beli masyarakat. Dari sisi budaya dan gender, penguasaan lahan oleh perusahaan telah menghancurkan tatanan budaya melalui hilangnya nilai

kearifan lokal yang selama ini menjadi simbol keseimbangan masyarakat lokal. Secara politik, kasus tanah selalu menjadi bargaining politik bagi para elit politik yang ingin maju dalam Pilkada Bupati dan Pemilu legislatif yang meng atasnamakan kepentingan rakyat.

Fenomena lain yang menarik adalah kebijakan lokal yang memberi peluang bagi hadirnya bisnis retail sampai pada tingkat kota dan pedesaan. Menjanjurnya bisnis retail seperti Indomaret, Circle K. telah menggeser kekuatan ekonomi tradisional yang selama ini menjadi penopang dan penyangga pengangguran. Terpusatnya keuntungan bisnis retail telah mematikan daya beli masyarakat dan turut melumpukan kekuatan ekonomi rakyat. prinsip keadilan ekonomi lokal semakin hari telah digeser ke arah jarum persaingan perdangan global yang menjadi ciri